



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2023

**TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
2023

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL
PENANGGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang tidak sesuai lagi dengan hukum acara, sehingga perlu menetapkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2023

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

ANWAR USMAN



Lampiran I : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
			AWAL	AKHIR	
	Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional		15 Februari 2024	20 Maret 2024	
1.	Pengajuan Permohonan Pemohon:	1. Pengajuan Permohonan Pemohon: a. PPIPU Anggota DPR dan DPRD b. PPIPU Anggota DPD	15 Februari s.d. 20 Maret 2024	18 Februari s.d. 23 Maret 2024	1. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024; 2. Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU; 3. Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.



		2. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3		
	a.	PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	15 Februari s.d. 20 Maret 2024	18 Februari s.d. 23 Maret 2024
	b.	PHPU Anggota DPD		
	3.	Penerbitan dan Penyampaian AP3		
	a.	PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	15 Februari s.d. 20 Maret 2024	18 Februari s.d. 23 Maret 2024
	b.	PHPU Anggota DPD		
2.	Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon	Melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon:		Perbaikan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Permohonan diajukan kepada Mahkamah;
	1.	PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	15 Februari s.d. 23 Maret 2024	18 Februari s.d. 26 Maret 2024
	2.	PHPU Anggota DPD		
3.	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	15 Februari s.d. 23 Maret 2024	18 Februari s.d. 26 Maret 2024
4.	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon	Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD	15 Februari s.d. 26 Maret 2024	18 Februari s.d. 27 Maret 2024



		2. PHPU Anggota DPD		
5.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK	1. Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 2. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK: a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD b. PHPU Anggota DPD	17 April 2024	22 April 2024
6.	Penyampaian Salinan Permohonan Permohonan kepada Terimohon dan Bawaslu	3. Penyampaian ARPK kepada Pemohon: a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD b. PHPU Anggota DPD	22 April 2024	23 April 2024
7.	Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	22 April 2024	23 April 2024
		Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	22 April 2024	23 April 2024



8.	Penetapan Sebagai Pihak Terkait	Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	23 April 2024	24 April 2024
		Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD		
9.	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	23 April 2024	25 April 2024
10.	Pemeriksaan Pendahuluan	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	26 April 2024	6 Mei 2024
11.	Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu	Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	6 Mei 2024	14 Mei 2024



12.	Pemeriksaan Persidangan	Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	7 Mei 2024	15 Mei 2024
13.	Rapat Permusyawaratan Hakim	RPH pembahasan dan pengambilan putusan: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	15 Mei 2024	17 Mei 2024
14.	Pengucapan Putusan/Ketetapan	Pengucapan Putusan/Ketetapan: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	20 Mei 2024	22 Mei 2024
15.	Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)	Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	24 Mei 2024	28 Mei 2024
16.	Rapat Permusyawaratan Hakim	RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	29 Mei 2024	3 Juni 2024



	Pengucapan Putusan/Ketetapan	Pengucapan Putusan/Ketetapan Perikara: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	4 Juni 2024	5 Juni 2024
18.	Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan	Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD	4 Juni 2024	5 Juni 2024

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
ANWAR USMAN**



Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

**TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
			AWAL	AKHIR
1.	Pengajuan Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional	1. Pengajuan Pernohonan Pernonohon Pemohon	15 Februari s.d. 20 Maret 2024	1. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d. 20 Maret 2024; 2. Permonahan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU; 3. Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU;
		2. Pencatatan Pernohonan Pernonohon dalam e-BP3	15 Februari s.d. 20 Maret 2024	18 Februari s.d. 23 Maret 2024
		3. Penerbitan dan Penyampaian At3	15 Februari s.d. 23 Maret 2024	18 Februari s.d. 23 Maret 2024



2.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK	1. Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 2. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK 3. Penyampaian ARPK kepada Pemohon	25 Maret 2024	25 Maret 2024	1. Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam e-BRPK menyesuaikan dengan penetapan KPU 2. Penyelesaian perkara selama 14 hari kerja sejak e-BRPK
3.	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu	Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon	25 Maret 2024	25 Maret 2024	
4.	Penugasan Permohonan Sebagai Pihak Terkait	Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait	25 Maret 2024	25 Maret 2024	
5.	Penetapan Sebagai Pihak Terkait	1. Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 2. Penyampaian Keterangan Sebagai Pihak Terkait	25 Maret 2024	26 Maret 2024	
6.	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan	Pemberitahuan Hari Sidang Pertama	26 Maret 2024	27 Maret 2024	
7.	Pemeriksaan Pendahuluan	Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon	28 Maret 2024	28 Maret 2024	
8.	Penyerahan Jawaban dan Keterangan para	Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak	1 April 2024	1 April 2024	



	Pihak dan Pemberi Keterangan	Terkait, dan Keterangan Bawaslu		
9.	Pemeriksaan Persidangan	1. Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pinak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu 2. Mendengar keterangan saksi dan, atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan	2 April 2024	5 April 2024
10.	Rapat Permasayawaran Hakim	RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan	8 April 2024	15 April 2024
11.	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	Pengucapan Putusan/ Ketetapan	16 April 2024	16 April 2024
12.	Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan	Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan	16 April 2024	16 April 2024

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,
ANWAR USMAN**



